

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Pemilihan umum (PEMILU) merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan di seluruh wilayah Negara kita. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan dan diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik Negara untuk lima tahun kedepan.

Partisipasi masyarakat dalam politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi dan sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik. Namun di era demokrasi sekarang ini kepemimpinan suatu Negara atau wilayah sudah di tentukan oleh masyarakat. Kepemimpinan yang demokratis yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Abdullah (2005:52) mengatakan bahwa “Satu-satunya hak politik yang masih dimiliki

rakyat adalah memberikan suara pada saat pemilu berlangsung”. Kemudian jika hak politik rakyat sudah tercapai maka wujud nyata dari asas responsibilitas dan akuntabilitas masyarakat terhadap pemilu berjalan seperti apa yang diharapkan dan suara rakyat tidak perlu lagi menggunakan sistem titip karena telah dilaksanakan dengan secara langsung. Pelaksanaan pemilihan tersebut akan lebih sah, dibandingkan dengan harus menitip suara.

Sebagai wujud Demokrasi masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pelaksanaan Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah (walikota). Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa setiap warga Negara diberikan kebebasan dan hak untuk ikut andil dalam sistem pemerintahan baik sebagai calon untuk dipilih maupun sebagai masyarakat yang ikut serta dalam berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan (pemilih).

“Berkaitan dengan yang disampaikan oleh Rahman (2002 : 128) : Suatu realitas, bahwa dalam mewujudkan berbagai kepentingan dan kebutuhan anggota masyarakat sering kali harus bertentangan dengan kepentingan kebijaksanaan Negara. Benturan ini bisa jadi mencakup segala kepentingan seluruh anggota masyarakat, termasuk pula keinginan untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik”.

Berbicara dengan partisipasi politik masyarakat, peneliti tertarik mengulas fenomena politik yang terjadi di Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung pada saat pelaksanaan Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015. Ada berbagai alasan yang membuat ketertarikan penulis dalam penelitian ini, salah satunya adalah tingkat partisipasi politik di Kelurahan Indra Kasih sangat rendah pada saat pelaksanaan pemilihan walikota Medan tahun 2015. Alasan selanjutnya adalah karena di kelurahan Indra Kasih masih jarang dilakukan penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat pada saat pelaksanaan pemilu maupun pemilukada.

Tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Indra Kasih pada saat pelaksanaan Pemilihan walikota Tahun 2015 sangat rendah. Masyarakat yang memberikan suara (berpartisipasi) tidak mencapai setengah dari total DPT yang terdaftar. Hal ini terlihat dari tingginya angka golput yang di temukan di tiap TPS, dari total DPT di kecamatan Medan Tembung yang berjumlah 122.453 orang yang menggunakan hak pilih hanya mencapai angka 32.257 orang atau hanya mencapai angka (26,34%). Masyarakat lebih banyak memilih tidak memberikan hak pilihnya sebagai warga Negara pada pelaksanaan pemilihan Walikota Medan tahun 2015. Terdapat beberapa alasan yang menjadi pemicu mengapa pemilihan walikota ini mengalami penurunan di kelurahan ini, yaitu :

- Jumlah pemilih berkurang karena adanya rasa apatisme melihat perilaku politisi yang tidak baik dari media maupun dari opini masyarakat.

- Adanya oknum-oknum tertentu yang dengan sengaja merampas hak politik rakyat sehingga masyarakat tidak bisa untuk memilih siapa calon yang pantas jadi pemimpin karena hak politik masyarakat seharusnya tetap diberikan kepada tiap-tiap masyarakat untuk memilih siapa yang pantas untuk memimpin Indonesia maupun daerahnya.
- Rendahnya partisipasi pemilih masyarakat di Kota Medan bisa disebabkan karena tingginya rasionalitas mereka dalam memilih para wakilnya di legislatif maupun eksekutif.

Tahap Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota Medan dimulai dengan pendaftaran dua bakal calon walikota dan wakil walikota Medan. Kedua kandidat tersebut adalah, pasangan H. Dzulmi Eldin dan Ahyar Nasution yang diusung PDI-P dan Nasdem. Pasangan lainnya adalah Ramadhan Pohan yang berpasangan dengan Eddie Kusuma. Menurut Pandopatan Tamba selaku Komisioner KPU Medan kedua paslon ini lolos ke tahap selanjutnya karena, kedua pasangan ini sudah memenuhi syarat minimal sebagai pasangan calon yaitu dukungan minimal 10 kursi dan juga syarat lainnya. Dari sisi kursi, pasangan calon H. Eldin-Ahyar punya dukungan 30 kursi. Sedangkan Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma 15 kursi, total sudah 45 kursi. "Untuk Medan dipastikan hanya ada dua pasangan calon karena jumlah kursi sudah habis.

Tahap selanjutnya, adalah pemeriksaan kesehatan pasangan calon walikota dan wakil walikota yang dilakukan oleh dokter sesuai dengan tahapan yang dianjurkan. KPU Medan bekerjasama dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kota Medan untuk tahapan ini. Pada tahapan selanjutnya dilakukan pemeriksaan administrasi pasangan calon, mulai dari dukungan parpol sampai dukungan calon.

Seperti informasi yang didapat, pasangan H. Eldin-Ahyar mendapat 30 dukungan kursi yang berasal dari 9 kursi PDI-P, 7 kursi Golkar, 5 dari kursi PKS, 4 dari kursi PAN, 2 dari kursi PKPI, 2 dari kursi Nasdem, dan 1 dari kursi PBB. Sedangkan 15 dukungan kursi untuk pasangan Ramadhan-Eddie berasal dari 5 kursi praksi Demokrat, 6 kursi Gerindra, dan 4 kursi Hanura.

B. Identifikasi Masalah

Yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan walikota Medan tahun 2015 yang sangat rendah.
2. Tingkat partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Indra kasih pada pelaksanaan pilkada tahun 2015.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Partisipasi Politik Masyarakat pada pelaksanaan pemilihan walikota Medan Tahun 2015 di Kelurahan Indra kasih Kecamatan Medan Tembung”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang dan Batasan masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini yaitu.

“Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015 di Kelurahan Indra Kasih”.

E. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi pooltik masyarakat pada pelaksaan pemilukada 2015 di keluran indra kasih.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi penulis dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan judul tulisan.
2. Tulisan ini juga dapat menjadi acuan dan juga cerminan bagi pembaca sebagai referensi dalam bidang partisipasi politik.